



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

LAPORAN KINERJA (LKj)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur patut dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Perlindungan-Nya sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dipercayakan kepada kami dengan baik.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih (*Good Governance dan Clean Government*) maka diperlukan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. BAPPEDA selaku Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 ini dibuat dan disampaikan, kiranya dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja BAPPEDA kedepan. Terima Kasih.

Tobelo. Januari 2023

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Halmahera Utara

Abdul Azis, S.STP
PEMBINA TK.I
NIP. 198010221998101001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1. Kedudukan	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi	5
D. Sumber Daya Aparatur	7
E. Faktor Kunci Keberhasilan	10
a. Analisis Lingkungan Internal.....	11
b. Analisis Lingkungan Eksternal.....	11
F. Maksud dan Tujuan.....	14
G. Sistematika Penyajian.....	15

**Bab II Perencanaan Kinerja**

A. Perencanaan Strategis	17
1. Visi Misi.....	17
2. Tujuan dan Sasaran.....	18
3. Strategi dan Kebijakan.....	29
4. Rencana Kinerja Tahunan.....	20
B. Penetapan Kinerja Tahun 2022	21

Bab III Akuntabilitas Kinerja	26
A. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	26
B. Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	27
C. Analisa Pencapaian Kinerja Program Serta Pendanaan.....	28

Bab IV Penutup	68
-----------------------------	----



IKHTISAR EKSEKUTIF

Petunjuk pelaksanaan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bagian dari asas akuntabilitas maka Perangkat Daerah harus melaporkan kinerja yang dicapai kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Salah satunya adalah lewat Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) yang memuat gambaran yang benar tentang kinerja yang dicapai.

Bappeda melaksanakan tupoksinya dalam menyusun dokumen perencanaan harus berbasis kinerja sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan terukur. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bappeda telah mencapai outcome dari output yang dihasilkan dan dapat memberikan kontribusinya terhadap terpenuhinya target-target dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi daerah 5 (lima) tahun kedepan. Ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya belum optimal dan menjadi catatan penting dalam evaluasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepan.

A. VISI MISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan".

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi yang adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.



Ada 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;

Dalam rangka mensukseskan Visi dan Misi Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, Bappeda menetapkan tujuan dan sasaran untuk dilaksanakan yang secara umum terkait dengan ke-empat misi namun secara khusus tugas fungsi Bappeda berkontribusi langsung dalam mendukung misi pertama dan kedua, sebagai berikut:

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN
I	Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan	Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah.
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu pada Visi dan Misi diatas, maka pada Tahun 2022 ada sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 2.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah



- 2.1.2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - 2.1.3 Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 2.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 2.1.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 2.1.6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - 2.1.7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - 2.2.3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 2.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan



- 3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - 3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - 3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



- 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 3.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

C. CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara selama tahun 2022 dapat dikategorikan **Baik**. Capaian kinerja untuk sasaran I dan II dapat dilaksanakan dengan baik walaupun dengan catatan pada beberapa kegiatan.



Capaian indikator Bappeda Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 tabel di bawah ini:

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	TARGET 2022	REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
					2021	2022	2021	2022
1	2	3		4		5		7
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	90	95	96,01	99,17	106,67	104,38
		Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	90	90	90,08	91,08	100,09	101,20
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	77	57,26	58,10	76,35	75,45

Rata-rata (akumulasi) capaian kinerja Bappeda Tahun 2022 dari ke-tiga IKU sebesar 94,05%.

Dengan demikian nilai efisiensi capaian dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 94,05% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 68,43% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 137,44% yang dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja sasaran telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wujud dari rencana pembangunan suatu wilayah pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pembangunan daerah yang semakin maju, tidak terlepas dari penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) oleh setiap unsur (Perangkat Daerah) guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah sudah menjadi kebutuhan di era keterbukaan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang setiap akhir tahun harus disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Isu strategis Bappeda Kabupaten Halmahera Utara yang juga tertuang dalam Rencana Strategis dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran BAPPEDA dalam fungsi koordinasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas;



2. Belum optimalnya efektifitas pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
3. Belum optimalnya ketersediaan data/informasi serta analisis perencanaan yang berkualitas;
4. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur BAPPEDA;
5. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam perencanaan;
6. Belum optimalnya peralatan dan perlengkapan kantor serta sarpras penunjang guna peningkatan kinerja aparatur Bappeda.

Isu strategis diatas yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama Bappeda seperti berikut ini:

Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Indikator : *Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.*

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah.

Indikator 1 : *Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah.*

Strategi : 1. Peningkatan efektifitas penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan ;
2. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memantapkan keselarasan dokumen perencanaan secara berjenjang ;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor ;
4. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data/informasi penyusunan dokumen perencanaan ;

Indikator 2 : *Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah .*

Strategi 2. Peningkatan konsistensi penjabaran program-program pembangunan daerah di seluruh tingkatan dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta peningkatan efektifitas pengendalian program/kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah.

Arah Kebijakan : 5. Melaksanakan pengendalian perencanaan, monitoring, serta evaluasi



pelaksanaan kegiatan perangkat daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Strategi 3. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur perencana serta peningkatan penyediaan operasional perkantoran, peralatan kerja, perlengkapan perkantoran dan sarpras yang memadai .

Arah Kebijakan : 6. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya perencana.

7. Melaksanakan penyediaan operasional perkantoran, Melaksanakan penyediaan peralatan kerja, perlengkapan perkantoran dan sarpras yang memadai.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bappeda telah mencapai outcome dari output-output yang dihasilkan dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap terpenuhinya target-target dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi daerah 5 (lima) tahun kedepan. Namun beberapa kegiatan belum dapat terlaksana dengan optimal dan menjadi catatan penting dalam evaluasi untuk mencapai output yang lebih baik serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda kedepan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara, merupakan unsur Perencana penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Utara (Daerah) yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan struktur organisasi dan tupoksi sesuai Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.



2. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

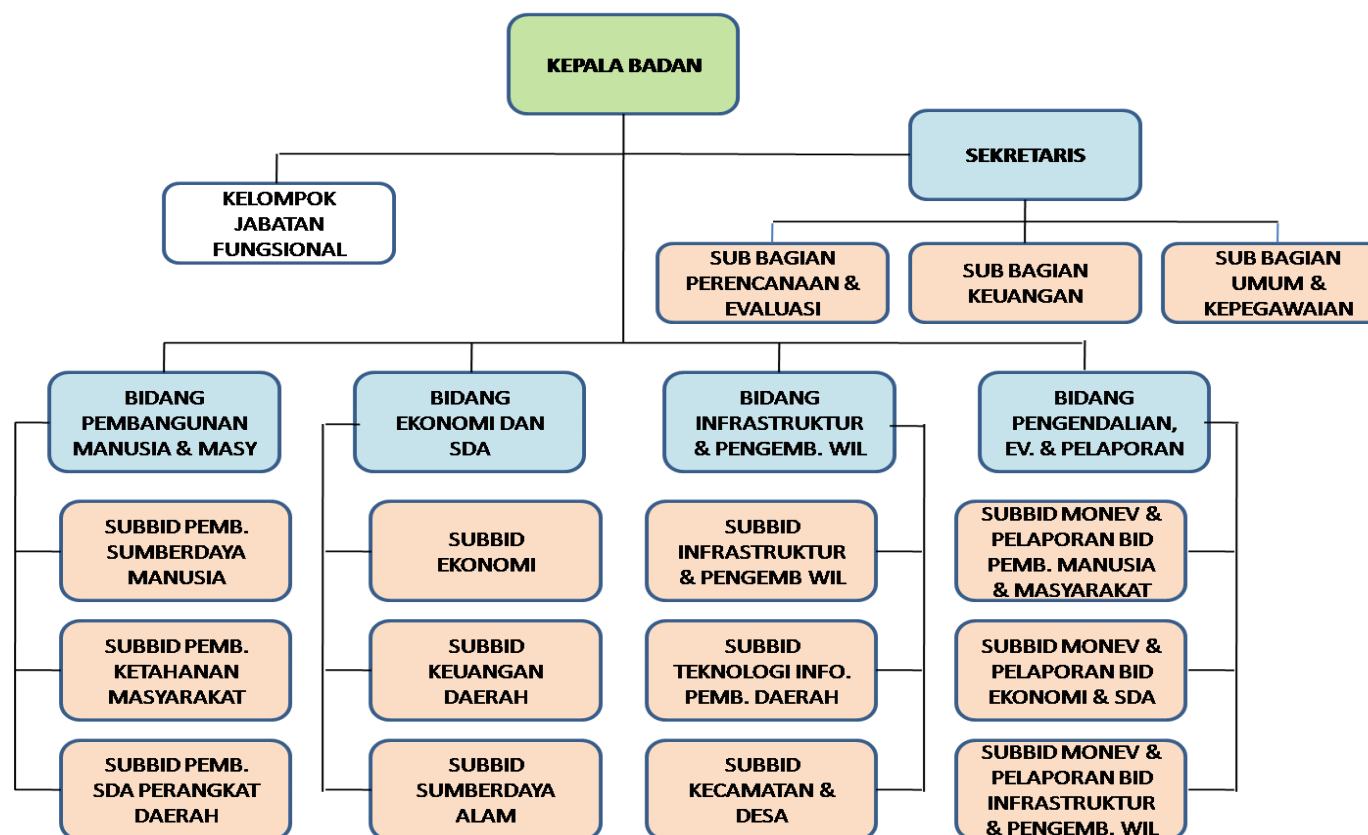
C. **STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara, merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.



- b. Bagian Sekretariat Bappeda yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia.
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Ketahanan Masyarakat.
 - 3) Sub Bidang Pembangunan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah
- d. Bidang Ekonomi dan SDA, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ekonomi.
 - 2) Sub Bidang Keuangan Daerah.
 - 3) Sub Bidang Sumberdaya Alam.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 - 1) Sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
 - 2) Sub Bidang Teknologi Informasi Pembangunan Daerah
 - 3) Sub Bidang Kecamatan dan Desa
- f. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi :
 - 1) Sub bidang Monev dan Pelaporan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 - 2) Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Ekonomi dan SDA
 - 3) Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.





D. SUMBERDAYA APARATUR DAN SARANA PRASARANA

a) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan akhir tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara didukung dengan 29 orang pegawai ASN. Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada juga tenaga yang dikontrak sebanyak 9 orang disebabkan kurangnya tenaga operasional yang sangat mempengaruhi kinerja Bappeda secara keseluruhan. Pegawai riil yang ada dapat dirinci sebagai berikut :

1) Berdasarkan Status Kepegawaian :

- Pegawai Daerah Kabupaten Halmahera Utara : 29 Orang
- Pegawai Kontrak : 9 Orang
- Jumlah** : **38 Orang**

2) PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

- Golongan IV : 4 Orang
- Golongan III : 21 Orang
- Golongan II : 4 Orang
- Jumlah** : **29 Orang**

3) Berdasarkan Jabatan dan Eselon :

- Kepala Badan (Eselon II/b) : 1 Orang
- Sekretaris Badan (Eselon III/a) : 1 Orang
- Kepala Bidang (Eselon III/b) : 4 Orang
- Kepala Seksi (Eselon IV/a) : 8 Orang
- Jumlah** : **14 Orang**



b) Sarana dan Prasarana

1) Tanah

- Luas tanah letak kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 600M².

2) Bangunan

- Gedung Kantor : 1 Unit
- Gedung Pengelola e-Government : 1 Unit
- Gedung / bangunan rumah Genset : 1 Unit

3) Barang Inventaris Bergerak

- Kendaraan Angkutan Darat Roda 4 : 3 Unit
- Kendaraan Angkutan Darat Roda 2 : 7 Unit

c) Barang Inventaris Lainnya

- Meja Kerja Pejabat : 30 Buah
- Kursi Kerja Pejabat : 28 Buah
- Meja & kursi Kayu/Rotan : 1 Set
- Kursi Rapat : 166 Buah
- Komputer PC : 6 Unit
- Printer : 19 Unit
- Laptop/Notebook : 22 Buah
- Infokus : 9 Buah
- Mesin Ketik : 1 Buah (1 Rusak)
- Console Unit : 1 Unit
- Air Condition : 14 Buah (2 Rusak Berat)
- Kipas Angin : 4 Buah
- Peta Citra Satelite Kecamatan : 17 Buah



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

• Telepon	: 1	Buah
• Faximile	: 1	Buah
• Internet	: -	Unit
• Handycam	: 2	Buah
• GPS	: 2	Buah
• Kamera Digital	: 4	Buah (1 Bh Hilang)
• Kursi Sofa	: 1	Buah
• Kursi Tamu	: 2	Unit
• Kursi Kayu/Rotan	: 6	Buah
• Kursi Bambu	: 1	Buah
• Brankas	: 2	Buah
• Lemari Arsip	: 9	Unit
• Lemari Kayu	: 8	Buah
• Lemari Pakaian	: 1	Unit
• Lemari Makan	: 1	Unit
• Buku Bacaan	: 100	Set
• Alat Rumah Tangga Lainnya	: 28	Buah
• Dispencer	: 6	Buah
• Alat Dapur Lainnya	: 1	Unit
• Tirai/Sekat	: 92	Unit
• Tirai/Besi Pengaman	: 92	Unit
• Tirai	: 92	Unit



d) Keuangan

Pada Perubahan APBD Tahun 2022, untuk mendukung proses pembangunan daerah, terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Utara, yang terjabarkan dalam berbagai program dan kegiatan, BAPPEDA memperoleh alokasi APBD sebesar **Rp. 16.397.733.851,00** yang terdiri dari beberapa item belanja sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung	: Rp. 6.072.149.847,00
Gaji Pokok Pegawai	: Rp. 1.759187.304,00
Tunjangan	: Rp. 592.915.765,00
Tambahan Penghasilan	: Rp. 3.548.223.545,00
Pembulatan Gaji	: Rp. 20.964,00
Iuran Askes, JKK, JK	: Rp. 105.202.269,00
Honorarium	: Rp. 66.600.000,00
2) Belanja Langsung	: Rp. 10.325.584.004,00
Belanja Pegawai	: Rp. 1.727.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 8.297.278.154,00
Belanja Modal	: Rp. 300.805.850,00

E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Agar Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara dapat tercapai dan terlaksana, maka diperlukan suatu analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki BAPPEDA serta analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh BAPPEDA. Berdasarkan ke-dua analisis inilah kemudian BAPPEDA akan merencanakan langkah-langkah strategis organisasi yang efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat tercapai dan dilaksanakan dengan baik.



a. **Analisis Lingkungan Internal**

- 1) Memiliki aparatur (SDM).
- 2) Memiliki sarana prasarana pendukung operasional organisasi.
- 3) Memiliki lingkungan kerja yang cukup kondusif dan nyaman.
- 4) Memiliki anggaran rutin maupun pembangunan yang cukup dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi BAPPEDA.
- 5) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara
- 6) Masih rendahnya kuantitas maupun kualitas sumberdaya aparatur perencana.
- 7) Kurangnya data / informasi maupun referensi-referensi berupa bahan pustaka, hasil kajian, maupun sumber referensi lainnya dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan.
- 9) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan.

b. **Analisis Lingkungan Eksternal**

- 1) Potensi Kabupaten Halmahera Utara yang sangat baik untuk dikembangkan.
- 2) Adanya komitmen pemimpin daerah dalam upaya pembenahan perencanaan pembangunan daerah ke arah yang lebih efektif dan efisien.
- 3) Semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Halmahera Utara.
- 4) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana.
- 5) Rendahnya pemahaman SKPD maupun masyarakat akan fungsi dan arti pentingnya perencanaan pembangunan daerah, terkait dengan upaya pembangunan di Daerah
- 6) Kebijakan pembangunan dari pusat yang senantiasa dapat berubah yang menuntut perencanaan yang lebih fleksibel dan terarah



- 7) Kemajuan teknologi informasi yang pesat belum diimbangi dengan sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang memadai
- 8) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

Dari analisis internal dan analisis eksternal diatas, selanjutnya dapat dibuat pembobotan untuk menentukan faktor-faktor utama yang sangat berpengaruh, sebagai berikut :

Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

No.	Faktor – Faktor Internal Strategis	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6

	KEKUATAN				
1.	Memiliki aparatur (SDM)	20	4	80	I
2.	Memiliki sarana prasarana pendukung operasional organisasi	7	1	7	IV
3.	Memiliki lingkungan kerja yang cukup kondusif dan nyaman.	5	2	10	III
4.	Memiliki anggaran rutin maupun pembangunan yang cukup dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi BAPPEDA.	13	2	26	II
5.	Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara	5	1	5	V

	KELEMAHAN				
1.	Masih rendahnya kuantitas maupun kualitas sumberdaya aparatur perencana..	15	4	60	I
2.	Kurangnya data / informasi maupun referensi-referensi berupa bahan pustaka, hasil kajian, maupun sumber referensi lainnya dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan.	7	1	7	IV
3.	Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan	13	2	26	II



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

4.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan.	10	2	20	III
5.	Belum optimalnya penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA serta uraian tugas oleh masing-masing pejabat struktural dan staff di BAPPEDA sehingga berpengaruh pada pengukuran capaian kinerja masing-masing aparatur	5	1	5	V

Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

No.	Faktor – Faktor Internal Strategis	Bobot	Rating	Skor	Ksimpulan
1	2	3	4	5	6

	PELUANG				
1.	Potensi Kabupaten Halmahera Utara yang sangat baik untuk dikembangkan.	7	1	7	IV
2.	Adanya komitmen pemimpin daerah dalam upaya pembenahan perencanaan pembangunan daerah ke arah yang lebih efektif dan efisien.	10	2	20	III
3.	Semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Halmahera Utara	20	4	80	I
4.	Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana	13	3	39	II

	ANCAMAN / TANTANGAN				
1.	Rendahnya pemahaman SKPD maupun masyarakat akan fungsi dan arti pentingnya perencanaan pembangunan daerah, terkait dengan upaya pembangunan di Daerah.	20	4	80	I
2.	Kebijakan pembangunan dari pusat yang senantiasa dapat berubah yang menuntut perencanaan yang lebih fleksibel dan terarah	7	1	7	IV
3.	Kemajuan teknologi informasi yang pesat belum diimbangi dengan sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang memadai	13	3	39	II
4.	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	10	2	20	III

Berdasarkan hasil analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan faktor ancaman/tantangan dengan menggunakan teknik Analisis SWOT, maka diperoleh alternatif-alternatif jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui pengelompokan (a). Strategi menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang; (b). Strategi mengatasi Kelemahan



dengan memanfaatkan Peluang; (c). Strategi menggunakan Kekuatan untuk menghadapi Ancaman/Tantangan dan (d). Strategi meminimalkan Kelemahan untuk menghadapi Ancaman/Tantangan.

Dari hasil pembobotan pada matriks, berdasarkan urutan asumsi strategi pilihan yang diuraikan dari 4 pengelompokan di atas, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

- a. Dayagunakan aparatur (SDM) yang kompeten, memiliki semangat dan kemauan belajar, mampu bekerja keras dan bertanggung-jawab terhadap beban pekerjaan untuk menindak-lanjuti komitmen pemimpin daerah dalam upaya pembenahan perencanaan pembangunan daerah ke arah yang lebih konsisten dan akuntabel berbasis IT.
- b. Memaksimalkan aparatur (SDM) dalam meningkatkan kapasitas sesuai bidangnya.
- c. Optimalkan sumberdaya aparatur BAPPEDA yang tersedia untuk mengembangkan potensi daerah, mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta meningkatkan koordinasi lintas sektor / PD.
- d. Optimalkan sumberdaya aparatur BAPPEDA yang tersedia untuk meningkatkan pemahaman PD maupun masyarakat akan fungsi dan arti pentingnya perencanaan.

F. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Bappeda Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik institusi. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja PD/Instansi Pemerintah dalam satu tahun anggaran, terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang direncanakan oleh PD/Instansi Pemerintah bersangkutan.

2. Tujuan



Tujuan adalah agar Instansi Pemerintah/PD dapat mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan terhadap target kinerja yang dicapai dalam satu tahun anggaran baik terhadap atasannya, lembaga pengawasan maupun terhadap publik.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;



6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

1) Pernyataan Visi

Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perencanaan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Visi Kepala Daerah adalah : ***"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan"***.

2) Pernyataan Misi

Untuk menunjang pencapaian Visi tersebut diatas, maka dijabarkan Misi, sebagai berikut :

5. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
6. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
7. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;



8. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;

2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah di atas, maka Bappeda menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, sebagai berikut :

**Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Halmahera Utara**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN KE -					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	0,9	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
		Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah.	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	90%	95%	95%	95%	95%	95%
			Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	77	79	82	85	88



3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan konsistensi penjabaran program-program pembangunan daerah di seluruh tingkatan dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta peningkatan efektifitas pengendalian program/kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah.
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur perencana serta peningkatan penyediaan operasional perkantoran, peralatan kerja, perlengkapan perkantoran dan sarpras yang memadai.

b. Kebijakan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut::

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan;
2. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memantapkan keselarasan dokumen perencanaan secara berjenjang;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor;
4. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data/informasi penyusunan dokumen perencanaan;
5. Melaksanakan pengendalian perencanaan, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
6. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya perencana;
7. Melaksanakan penyediaan operasional perkantoran, melaksanakan penyediaan peralatan kerja, perlengkapan kantor dan sarpras yang memadai.

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN



Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, BAPPEDA Halmahera Utara menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran tiap tahun. Pada tahun 2022, BAPPEDA merencanakan target kinerja seperti dijelaskan pada tabel II.2. berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah.	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	95
		Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	90
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan Kinerja / Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan beserta target kinerja dan Anggarannya.

Penetapan Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara dipaparkan sebagaimana pada Tabel II.3 berikut ini:



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET
	1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	1. Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah 2. Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	95% 90%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah: 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan: 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah. 2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. 3. Pelaksanaan Konsultasi Publik. 4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 8. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah: 1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD. 3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 3. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 145.866.500 ,- Rp. 855.559.500,- Rp. 313.796.000,- Rp. 195.022.000,- Rp. 400.264.000 Rp. 820.710.000 Rp. 821.747.000 Rp. 55.087.500,- Rp 1.661.633.000,- Rp. 238.720.000 Rp 227.929.500,- Rp 577.675.500,-	1 Dok 2 Dok 1 BA 1 BA 1 BA 588 Usulan 2 Dok 51 Masukan 56 Orang 1 Buku 2 Lap 7 Lap



				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah:		
				1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:		
				1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp. 103.319.000,-	2 Dok
				2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.	Rp. 4.000.000,-	4 PD
				3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.	Rp. 3.682.500,-	4 PD
				4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.	Rp. 90.958.500,-	1 Lap
				5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp. 102.930.000,-	2 Dok
				6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.	Rp. 8.000.000,-	13 PD
				7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.	Rp. 2.982.500,-	13 PD
				8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.	Rp. 134.537.500,-	1 Lap
				2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam):		
				1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp. 81.768.000,-	2 Dok
				2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.	Rp. 4.000.000,-	5 PD
				3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.	Rp. 2.865.500,-	5 PD



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

				4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.	Rp. 88.283.500,-	1 Lap
				5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp. 81.768.000,-	2 Dok
				6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.	Rp. 2.800.000,-	4 PD
				7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.	Rp. 2.910.500	4 PD
				8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.	Rp. 83.425.000,-	1 Lap
			3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:.			
				1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp. 104.962.500,-	2 Dok
				2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	Rp. 6,373,950,-	6 PD
				3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	Rp. 4.224.000,-	6 PD
				4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.	Rp. 256.944.000,-	1 Lap
				5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp. 104.342.500,-	2 Dok
				6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Rp 8.000.000,-	17 PD
				7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan.	Rp. 2.982.500,-	17 PD
				8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.	Rp. 93.183.000	1 Lap



2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah: 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor. 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 6) Fasilitas Kunjungan Tamu. 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 23.573.500,- Rp. 899,500,- Rp. 899,500,- Rp. 899,500,- Rp. 899,500,- Rp. 23.772.000,- Rp. 4,036,500,- Rp. 6.072.149.847,- Rp. 13.565.500,- Rp. 8.638.500,- Rp. 85.467.000,- Rp. 388.532.000,- Rp. 20.998.000,- Rp. 300.805.850,- Rp. 145.215.800 Rp. 60.625.000 Rp. 79.524.000 Rp. 23.996.000,- Rp 424.910.000,-	2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 4 Lap 806 OB 2 Lap 4 Lap 1 Paket 56 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Dok 12 Lap 5 Lap
---	--	------------------------------	----	--	--	--



			SKPD.		
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:	Rp. 214.680.040,-	1 Lap
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Rp. 81.452.052,-	1 Lap
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp. 21.000.000	1 Lap
			3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Rp. 88.224.012	1 Lap
			4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.		
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:	Rp. 297.109.750,-	10 Unit
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Rp. 4.500.000,-	1 Unit
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 300.000.000,-	1 Unit
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp. 19.681.000	1 Unit
			4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, sesuai perubahan pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran T.A 2022, perlu dilakukan penilaian untuk mengevaluasi dan mengukur pencapaian kinerja di BAPPEDA dimana hasilnya memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data dan dilakukan evaluasi, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja Tahun 2022 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dengan skala nilai sebagai berikut

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	Interval Nilai	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75% s/d 100%	Baik
3.	50% s/d 75%	Cukup Baik
4.	Kurang dari 50%	Kurang Baik

**B. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN**

Dalam perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Oleh karena itu, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran tersebut dituntut adanya keterkaitan yang erat antara anggaran dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit organisasi. Penilaian terhadap efisiensi penggunaan anggaran yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan target kinerja sasaran Bappeda Tahun Anggaran 2022 menggunakan standar pengukuran skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel III.2 Efisien Program dan Pendanaan Tahun 2022

NO.	Interval Nilai	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Efisien (SE)
2.	75% s/d 100%	Efisien €
3.	50% s/d 75%	Kurang Efisien (KE)
4.	Kurang dari 50%	Tidak Efisien (TE)

Anggaran Belanja Bappeda pada Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp. **16.397.733.851,-** terealisasi sebesar Rp. **11.220.388.213,-** atau **68,43%**

Capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2022 per Indikator sebagai berikut :

1. IKU Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah, target 95% realisasi 99,17% dengan capaian **104,38%**;
2. IKU Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, target 90% realisasi 91,08% dengan capaian **102,31%**;
3. IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah, target 77% realisasi 58,10% dengan capaian **75,45%**;

Rata-rata (*akumulasi*) capaian kinerja Bappeda Tahun 2022 dari ke-tiga IKU sebesar **94,05%**,



Dengan demikian nilai efisiensi capaian dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **94,05%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **68,43%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **137,44%** yang dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja sasaran telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

C. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA PENDANAAN

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja BAPPEDA ditahun 2022, maka harus mengukur pencapaian kinerja atas indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut dapat dianalisa dan dievaluasi untuk untuk proses perencanaan ditahun mendatang.

Tabel III.3

Rekapan Pencapaian Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	58,1	75,45
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	90%	87,10%	89,19



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00
			Tingkat Konsistensi Penganggaran Perangkat Daerah	95%	95%	100,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dok	1 Dok	50,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dok	1 Dok	50,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dok	1 Dok	50,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dok	1 Dok	50,00



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	1 Lap	50,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	100%	48,66%	48,66%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	806 OB	806 OB	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	1 Lap	50,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Lap	4 Lap	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang	56 Orang	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,%	100%	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Paket	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	4 Dok	100,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	100,00



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	5 Lap	100,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	100,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	100,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50%	50,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100,00



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	0,00
2	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah		Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	95%	99,17%	104,39%
			Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	90%	91,08%	101,20%
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN	90%	82,33%	91,48



			PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM	90%	97,20%	108,00
			PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	90%	95,78%	106,42
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100%	100%	100,00
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	1 Dok	1 Dok	100,00
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dok	2 Dok	100,00
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	1 BA	100,00
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	100,00
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	1 BA	100,00



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	588 Usulan	322 Usulan	54,76
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dok	2 Dok	100,00
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100%	50%	50,00
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	51 Masukan	51 Masuka	100,00
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	56 Orang	0	0,00
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	0	0,00
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja minimal 80%	90%	91,08%	101,20



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Lap	2 Lap	100,00
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	7 Lap	7 Lap	100,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	TINGKAT KONSISTENSI PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD-RKPD) BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN	95%	97,44%	102,56
			TINGKAT KONSISTENSI PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD-RKPD) BIDANG PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM	95%	97,17%	102,28
			TINGKAT KONSISTENSI PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD-RKPD) BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	95%	98,18%	103,35



		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	95,00	100,00	105,26
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	2 Dok	100,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4 PD	4 PD	100,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4 PD	4 PD	100,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Lap	1 Lap	100,00



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	2 Dok	100,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 PD	13 PD	100,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 PD	13 PD	100,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Lap	1 Lap	100,00
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA	95%	100%	105,26



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	2 Dok	100,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 PD	5 PD	100,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 PD	5 PD	100,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Lap	1 Lap	100,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	2 Dok	100,00



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 PD	4 PD	100,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 PD	4 PD	100,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Lap	1 Lap	100,00
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95%	100%	105,26
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	2 Dok	100,00



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 PD	6 PD	100,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 PD	6 PD	100,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap	1 Lap	100,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	2 Dok	100,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	17 PD	17 PD	100,00



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	17 PD	17 PD	100,00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Lap	1 Lap	100,00

Berikut adalah pencapaian kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan kinerja Tahun 2021 untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda yang kemudian dapat menjelaskan kinerja outcome yang dicapai sesuai Tupoksi Bappeda, berikut pada tabel di bawah ini;

Tabel III.4

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		KETERANGAN
		2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	90%	95%	96,01%	99,17%	Analisis penyebab keberhasilan /
2.	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	90%	90%	90,08%	91,08%	



3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	77	57,26	58,10	<i>kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja dijelaskan pada poin selanjutnya</i>
----	------------------------------	----	----	-------	-------	--

Sasaran Strategis I :

Secara umum kinerja Bappeda dapat dikatakan cukup baik, dengan beberapa catatan mengenai IKU yang mencapai atau tidak mencapai target seperti yang diharapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah”



Tabel III.5
Sasaran Strategis I

Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
TINGKAT KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	90	96,01	106,68	95	99,17	104,39	3,16	(2,29)	95
TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	90	90,08	100,09	90	91,08	101,20	1,00	1,11	90
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN	90	90,94	101,04	90	82,33	91,48	(8,61)	(9,56)	90
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM	90	89,56	99,51	90	97,2	108	7,64	8,49	90



Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	90	89,75	99,72	90	95,78	1,06	6,03	(98,66)	90
Presentase Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100	100	100	100	100	100	-	-	100
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	2	2	100	1	1	100	(1)	-	9
Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	100	2	2	100	(1)	-	14
Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	2	100	1	1	100	(1)	-	8
Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	2	100	1	1	100	(1)	-	8
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	2	100	1	1	100	(1)	-	8
Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	588	588	100	588	322	54,76	(266)	(45,24)	3528



Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	3	100	2	2	100	(1)	-	15
Persentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100	50	50	100	50	50	-	-	100
Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	51	51	100	51	51	100	-	-	306
Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	56	0	0	56	0	0	-	-	336
Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		0	0	1	0	0	-	-	5
Presentase Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja minimal 80%	90	91,84	102,04	90	91,08	101,20	(0,76)	(0,84)	95



Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	0	0	2	2	100	2	100,00	15
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	7	0	100	7	7	100	7	-	42
TINGKAT KONSISTENSI PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD-RKPD) BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN	90	77,34	85,93	95	97,44	102,56	20,10	16,63	95
TINGKAT KONSISTENSI PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD-RKPD) BIDANG PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM	90	84,42	93,79	95	97,17	102,28	12,75	8,49	95



Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
TINGKAT KONSISTENSI PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD-RKPD) BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	90	91,09	101,21	95	98,18	103,35	7,09	2,14	95
Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	95	100	105,26	-	5,26	95
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	100	2	2	100	(1)	-	15
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4	4	100	4	4	100	-	-	24



Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4	4	100	4	4	100	-	-	24
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2	2	100	1	1	100	(1)	-	800%
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100	2	2	100	-	-	15
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13	13	100	13	13	100	-	-	78



Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13	13	100	13	13	100	-	-	78
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2	2	100	1	1	100	(1)	-	8
Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	95	100	105,26	-	5,26	95
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	100	2	2	100	(1)	-	15



Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	5	100	5	5	100	-	-	30
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	5	100	5	5	100	-	-	30
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2	2	100	1	1	100	(1)	-	8
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	100	2	2	100	(1)	-	15



Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	100	4	4	100	-	-	24
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	100	4	4	100	-	-	24
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2	2	100	1	1	100	(1)	-	8
Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	95	100	105,26	-	5,26	95



Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	100	2	2	100	(1)	-	15
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6	6	100	6	6	100	-	-	36
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6	6	100	6	6	100	-	-	36
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	2	100	1	1	100	(1)	-	8



Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	100	2	2	100	(1)	-	15
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	17	17	100	17	17	100	-	-	85
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	17	17	100	17	17	100	-	-	85
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	2	100	1	1	100	(1,0)	-	8

**a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran****1. “Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah”**

Pada dasarnya indikator ini menilai sejauh mana tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah . Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program RPJMD tahun berkenaan. Dari hasil pengukuran, realisasi kinerja ditahun 2021 sebesar 96,01% dan ditahun 2022 sebesar 99,17% melebihi target yang ditetapkan yaitu ditahun 2021 sebesar 90% dan 2022 sebesar 95% dengan tingkat capaian ditahun 2021 sebesar 106,68% dan tahun 2022 sebesar 104,39%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini adalah sebagai berikut :

- Adanya koordinasi yang intensif antara Bappeda dengan perangkat daerah dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah
- Bappeda melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah sehingga perangkat daerah dapat mengoptimalkan kinerjanya
- Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas, khususnya dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- Dukungan perangkat daerah dalam memberikan data perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. “Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”

Indikator ini mengukur realisasi sasaran strategi perangkat daerah tahun berkenaan dibandingkan dengan target sasaran strategis perangkat daerah tahun berkenaan. Dari hasil pengukuran, realisasi kinerja ditahun 2021 sebesar 90,08% dan ditahun 2022 sebesar 91,08% melebihi target yang ditetapkan yaitu ditahun 2021 sebesar 90% dan 2022 sebesar 90% dengan tingkat capaian ditahun 2021 sebesar 100,09% dan 2022 sebesar 101,20%.



Faktor yang mempengaruhi :

- Perencanaan di perangkat daerah masing-masing sudah ada pemetaan kegiatan dengan target indikatornya masing-masing yang akan dilaksanakan sehingga mempermudah perangkat daerah dalam menghasilkan kinerjanya secara optimal
- Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah terealisasi baik itu kegiatan fisik dan non fisik, hal ini dapat ditunjukkan dengan data capaian realisasi kinerja perangkat daerah.
- Komitmen perangkat daerah untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Dalam menjalankan tugas desentralisasi dibidang perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara didukung dengan 2 Program dan 6 indikator program dengan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 102,35% dan 6 Kegiatan dengan 6 Indikator Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja indikator kegiatan sebesar 94,50% dan 36 Sub Kegiatan dengan 36 Indikator kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan sebesar 93,19%.

c. Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat ketidakberhasilan kinerja program dan kegiatan pada sasaran I diurai sebagai berikut :

1. Faktor penunjang keberhasilan

- Komitmen perangkat daerah dalam mengoptimalkan kinerjanya.
- Ketersedian anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas Bappeda.

2. Faktor penghambat keberhasilan



- Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang capaiannya hanya 50% yang disebabkan karena anggarannya tidak terealisasi.

Tabel III.6
Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.314.010.500	3.231.588.064	51,18
a	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.552.965.000	2.734.032.419	76,95
b	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.955.440.500	-	-
c	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	805.605.000	497.555.645	61,76



2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	450.410.000	296.430.153	65,81
a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	450.410.000	296.430.153	65,81
b	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	347.820.500	263.323.604	75,71
c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	579.438.500	327.659.073	56,55
	TOTAL	6.764.420.500,00	3.528.018.217,00	52,16

Untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara persentase capaian kinerja program dan kegiatan sebesar 94,50 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 52,16% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 181,19% Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

**Sasaran Strategis II :**

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator yang diukung oleh 1 Program 6 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan kategori capaian Baik karena mencapai nilai 82,26%.

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”**Tabel III.5**

Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	75	57,26	76,35	77	58,1	75,45	0,84	(0,89)	88
TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100	50,91	50,91	90	88,37	98,19	37,46	47,28	90
Tersedianya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	12	50,00%	100	100	100	88,00	99,50	95
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100	2	2	100	(1,00)	-	14



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	2	1	50	-	(50,00)	12
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100	2	1	50	-	(50,00)	12
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100	2	1	50	-	(50,00)	12
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100	2	1	50	-	(50,00)	12



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100	2	1	50	-	(50,00)	12
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	4	25	4	4	100	-	75,00	24
Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	100	54,84	54,84%	100	48,66	48,66	(6,18)	48,11	100
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	806	806	100	806	806	100	-	-	222
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	2	1	50	-	(50,00)	12



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	4	22	4	4	100	-	78,00	24
Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	11,72	11,72	100	100	100	88,28	88,28	100
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	1	1	100	1,00	100,00	5
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	128	15	12	56	56	100	41,00	88,00	300
Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	-	-	100
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100	1	1	100	-	-	6
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100	1	1	100	-	-	6



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	1	1	100	1,00	100,00	5
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100	1	1	100	-	-	6
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	100	4	4	100	-	-	24
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	100	12	12	100	-	-	72
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	5	100	5	5	100	-	-	30
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	-	-	100
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100	1	1	100	-	-	6



Laporan Kinerja (LKj) - BAPPEDA

Tahun 2022

Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	100	1	1	100	-	-	6
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100	1	1	100	-	-	6
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100	1	1	100	-	-	6
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	33	33	100	50	50	17,00	17,00	100
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	100	10	10	100	-	-	64
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1	0	0	-	-	5



Indikator	2021			2022			Pemenuhan Perbandingan		Target Renstra 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0		1	1	100	1	100,00	5
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	0	0	1	0	0	-	-	6

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

- a. **“Nilai SAKIP Perangkat Daerah”**, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab Halmahera Utara untuk Tahun 2021 dan 2022 realisasinya tidak memenuhi target yang ditetapkan. Walaupun demikian, capaian di tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu dari 57,26 di 2021 menjadi 58,10 di 2022.

Faktor yang mempengaruhi karena belum optimalnya penyiapan dokumen, data dan informasi pendukung penilaian SAKIP sehingga terjadi penurunan nilai realisasi, memastikan adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk menunjang indikator kinerja utama yang ditetapkan Diharapkan untuk pencapaian yang lebih baik kedepan adalah dengan menyiapkan dokumen, data dan informasi pendukung penilaian lebih awal sehingga tepat waktu dalam penyajian dan penyampaianya.

Tindaklanjut untuk pencapaian yang lebih baik adalah dengan menyiapkan dokumen, data dan informasi pendukung penilaian serta respons dari bidang-bidang terhadap target masing-masing individu yang dicapai dalam penyajian dan penyampaianya dalam bentuk laporan yang dicapai.

**b. Analisis Program dan Pendanaan**

Untuk meningkatkan nilai SAKIP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara didukung dengan 1 Program dan 1 indikator program dengan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 98,19% dan 6 Kegiatan dengan 7 Indikator Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja indikator kegiatan sebesar 85,52% dan 27 Sub Kegiatan dengan 27 Indikator sub kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan sebesar 81,48%.

c. Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat ketidakberhasilan kinerja program dan kegiatan pada sasaran II diurai sebagai berikut :**1. Faktor Penghambat keberhasilan**

- Ketersedian anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas Bappeda. Ditahun 2022, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.16.397.733.851, realisasinya sebesar Rp. 11.220.388.213, dengan tingkat capaian 53,14%. Dengan tingkat capaian yang rendah, mengakibatkan kinerja Bappeda tidak optimal.

Tabel III.6**Realisasi dan Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.706.054.351	7.101.387.319	81,57
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.980.000	42.642.500	77,56



b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.094.353.847	5.185.901.149	85,09
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	473.999.000	435.030.295	91,78
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.056.074.650	705.992.031	66,85
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.356.104	256.525.522	63,28
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.290.750	475.295.822	76,50
Total		8.706.054.351	7.101.387.319	81,57

Untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara persentase capaian kinerja program dan kegiatan sebesar 82,77% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 81,57% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 101,47% Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.



BAB IV PENUTUP

A. PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan uraian tentang Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang merupakan tinjauan secara umum berdasarkan pencapaian indikator sasaran dan pencapaian kinerja bahwa :

1. Sebagaimana uraian capaian target kinerja terhadap 2 (dua) sasaran kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Tahun Anggaran 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Indikator sasaran ***Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah***, yang ditargetkan 95% untuk melihat konsistensi terhadap jumlah program pada RKPD Tahun 2022 sebanyak 238 program dibandingkan dengan RPJMD Tahun 2022 sebanyak 240 program dengan capaian **99,17%**. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 maka terjadi peningkatan pencapaian dibandingkan tahun sebelumnya.

Tercapainya sesuai target yang ditetapkan disebabkan karena pelaksanaan pengendalian perencanaan Bappeda lebih optimal serta ada penambahan anggaran untuk menunjang indikator ini.

Tindaklanjut untuk kedepannya, Bappeda berusaha mengoptimalkan pengendalian perencanaan yang sesuai dengan kondisi dan keselarasan dokumen tahunan terhadap dokumen perencanaan lima tahunan daerah maupun perangkat daerah.

- b) Indikator sasaran ***Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah***, dengan target 90% realisasinya sebesar 91,08%, tingkat capaiannya sebesar **101,20%**.

Penyebab : pada perencanaan di perangkat daerah masing-masing sudah ada pemetaan kegiatan dengan target indikatornya masing-masing yang akan dilaksanakan sehingga mempermudah perangkat daerah dalam menghasilkan kinerjanya secara optimal.



Tindaklanjut Bappeda terus berkoordinasi dengan perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah ditahun-tahun mendatang.

- c) Indikator sasaran **Nilai SAKIP Bappeda**, indikator ini untuk mengukur sistem akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda. Untuk target **77%** tahun 2022 realisasinya hanya sebesar **58,10%** atau capaian hanya 75,45%.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja sasaran ini adalah belum optimalnya penyiapan dokumen, data dan informasi pendukung penilaian SAKIP.

Tindaklanjut untuk pencapaian yang lebih baik adalah dengan menyiapkan dokumen, data dan informasi pendukung penilaian serta respons dari bidang-bidang terhadap target masing-masing individu yang dicapai dalam penyajian dan penyampaian dalam bentuk laporan yang dicapai.

Rata-rata (*akumulasi*) capaian kinerja Bappeda Tahun 2022 dari ke-tiga IKU sebesar **94,05%**.

Dengan demikian nilai efisiensi capaian dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 94,05% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 68,43% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 137,44% yang dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja sasaran telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

2. Realisasi keuangan Tahun 2022 lebih kecil yaitu sebesar 68,43% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 70,08%.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022 menunjukkan tingkat capaian yang dapat dikatakan baik walaupun ada beberapa kegiatan dengan output yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan itupun dengan kendala yang berasal dari faktor eksternal seperti kondisi keuangan daerah. Pencapaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menuntaskan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk pencapaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan hasil **Baik**, akan menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *Good Governance* untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.



Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan sesungguhnya, sebagai laporan pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022.

Tobelo, Januari 2023

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Halmahera Utara

Abdul Azis, S.STP

PEMBINA TK. I

NIP. 198010221998101001